

TESIS

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ANGGARAN
DI BADAN PUSAT STATISTIK

Disusun Oleh:

NAMA	:	WAWAN KURNIAWAN
NOMOR POKOK	:	1863001100
PROGRAM STUDI	:	ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI	:	MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara (M.Tr.APN)



PROGRAM MAGISTER TERAPAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
2020

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Wawan Kurniawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 1863001100
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tugas Akhir/Tesis : Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran di Badan Pusat Statistik

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Pembimbing Tesis

A. Aziz Sanapiah
(Prof. Dr. A. Aziz Sanapiah, MPA)

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Wawan Kurniawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 1863001100
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tugas Akhir/Tesis : Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran di Badan Pusat Statistik

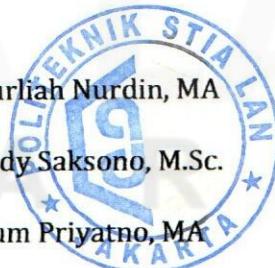
Telah mempertahankan Tugas Akhir ini dihadapan Tim Penguji
Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara
Politeknik STIA LAN Jakarta

Hari : Kamis
Tanggal : 2 Juli 2020
Pukul : 17.00-18.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua Sidang : Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA
Sekretaris : Dr. R.N. Afsdy Saksono, M.Sc.
Anggota : Dr. Makhdum Priyatno, MA
Pembimbing Tugas
Akhir/Tesis : Prof. Dr. A. Aziz Sanapiah, MPA



Lamri
Aufzay
M.Z.
A.Hi.Kurnia

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wawan Kurniawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 1863001100
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran di Badan Pusat Statistik merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, Juli 2020

Penulis,



Wawan Kurniawan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya serta atas doa restu dan dukungan Emak, Ibu, istri, dan putri-putri tercinta, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "**Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran di Badan Pusat Statistik**" ini. Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat akademis guna memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Namun penulis berharap tesis ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan anggaran di Badan Pusat Statistik.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Bapak Prof. Dr. A. Aziz Sanapiah, MPA selaku dosen pembimbing serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta dan Ketua Tim Pengudi;
2. Bapak Dr. R.N. Afsdy Saksono, M.Sc. selaku Sekretaris Tim Pengudi;
3. Bapak Dr. Makhdum Priyatno, MA selaku Anggota Tim Pengudi;
4. Bapak Ir. Atqo Mardiyanto, M.Si. selaku Kepala Bina Program BPS mewakili Pimpinan BPS atas izin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian;
5. Bapak Nurul Hasanudin, SST, M.Stat. selaku Direktur Statistik Harga BPS atas izin belajar yang diberikan kepada penulis;
6. Bapak Buyung Airlangga, M.Bus., Bapak Martin Wibisono, SST, M.Si., Bapak Tommy Hadiyanto, SST, SE, M.Si., Ibu Sri Wahyuni, SE, Bapak Ichsan, SST, Ibu Rieka Zhuraida, S.Kom., Mba Septi Adiyati Bananingtiyas,

S.Mn., Kang Dede Fitriadi, SAB, dan Mba Khoirotunnisa', SST yang telah berkenan menjadi *key informant* penelitian ini;

7. Bapak Muhammad Firmansyah Rifai, SE, MAB selaku Kepala Subdirektorat Statistik Harga Konsumen dan para Kepala Seksi di Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS atas izin dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama menjalankan izin belajar;
8. Kang Aris Rusyiana, S.Si, MA, MAP dan Mas Zanial Fahmi Firdaus, SST atas motivasi dan sumbangsih ide yang diberikan kepada penulis;
9. Rekan-rekan yang tergabung dalam grup WA "Hallo BackOffice" atas partisipasi dan dukungannya; serta
10. Semua pihak yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat disebutkan satu per satu.

Jakarta, Juli 2020

Penulis,



Wawan Kurniawa

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

ABSTRAK

WAWAN KURNIAWAN, 1863001100
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ANGGARAN DI BADAN
PUSAT STATISTIK
90 halaman, 5 bab, xiii, 3 tabel, 10 gambar, 5 lampiran
Daftar Pustaka: 28 buku dan peraturan, 12 artikel, 3 lain-lain (2001-2020)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab kurang efektifnya implementasi sistem informasi pengelolaan anggaran di Badan Pusat Statistik (BPS). Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor penyebab kurang efektifnya implementasi Sistem Informasi *BackOffice* sebagai sistem informasi pengelolaan anggaran di BPS. Pertama, Sistem Informasi *BackOffice* belum terhubung secara langsung dengan sistem informasi keuangan dari Kementerian Keuangan. Kedua, Sistem Informasi *BackOffice* belum terhubung dengan sistem informasi yang menerbitkan SPM dan SP2D di KPPN. Ketiga, terdapat perbedaan struktur *database* antara Sistem Informasi *BackOffice* dengan sistem informasi keuangan dari Kementerian Keuangan. Keempat, kurangnya penyelenggaraan pelatihan penggunaan Sistem Informasi *BackOffice*. Kelima, kurang andalnya Sistem Informasi *BackOffice*. Keenam, kurang cakap dan disiplinnya operator Sistem Informasi *BackOffice*.

Kata kunci: anggaran, efektivitas, Sistem Informasi *BackOffice*.

**APPLIED MASTER PROGRAM
PUBLIC DEVELOPMENT ADMINISTRATION
NIPA SCHOOL OF ADMINISTRATION JAKARTA**

ABSTRACT

*WAWAN KURNIAWAN, 1863001100
IMPLEMENTATION OF BUDGET MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM IN
BPS-STATISTICS INDONESIA
90 pages, 5 chapters, xiii, 3 tables, 10 pictures, 5 appendices
References: 28 books and regulations, 12 articles, 3 others (2000-2020)*

This study aims to explain the factors causing the ineffective implementation of the budget management information system at the BPS-Statistics Indonesia. This study uses a qualitative research method with a case study approach. Data collection was carried out through interviews and document review. The results showed that there were several factors causing the ineffective implementation of the BackOffice Information System as a budget management information system at BPS. First, the BackOffice Information System has not been directly connected to the Ministry of Finance's financial information system. Second, the BackOffice Information System has not been connected to the information system that issues SPM and SP2D at KPPN. Third, there are differences in the database structure between the BackOffice Information System and the financial information system of the Ministry of Finance. Fourth, the lack of training in the use of BackOffice Information Systems. Fifth, the lack of reliability of the BackOffice Information System. Sixth, there is a lack of competence and discipline from BackOffice Information System operators.

Keywords: budget, effectiveness, BackOffice Information Systems.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Terhadap Kepentingan Dunia Akademis	11
2. Manfaat Terhadap Dunia Praktis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Teori	13
1. Keuangan Negara	13
a. Definisi Keuangan Negara	13
b. Ruang Lingkup Keuangan Negara	15
2. Penganggaran	16
3. Sistem Informasi Penganggaran	21
a. Konsep Sistem Informasi	21
b. <i>E-Government</i>	23
c. Sistem Informasi Penganggaran	25
d. Efektivitas Sistem Informasi Penganggaran	26
e. Faktor Efektivitas Sistem Informasi Penganggaran	28
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Konsep Kunci	33
D. Model Berpikir	35
E. Pertanyaan Penelitian.....	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Metode Penelitian	37
B. Teknik Pengumpulan Data	37
C. Instrumen Penelitian	38
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	40
A. Deskripsi Lokasi dan Objek Penelitian	40
1. Gambaran Umum Badan Pusat Statistik	40
2. Gambaran Umum Sistem Informasi <i>BackOffice</i>	44
B. Penyajian Data dan Pembahasan	54
1. Efektivitas Sistem Informasi <i>BackOffice</i>	54
a. Aspek Keakuratan	55
b. Aspek Ketepatan Waktu	59
c. Aspek Keterintegrasian	62
d. Aspek Kepuasan Pengguna	68
2. Faktor Efektivitas Sistem Informasi <i>BackOffice</i>	71
a. Faktor Keandalan Sistem Informasi <i>BackOffice</i>	72
b. Faktor Kecakapan Pengguna Sistem Informasi <i>BackOffice</i>	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS Tahun 2014-2018.	8
2.	Penelitian Terdahulu.	30
3.	<i>Key Informant</i> Penelitian.	37

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
1.	Presentase Pengguna Internet di Negara Maju dan Negara Berkembang.	3
2.	Peringkat <i>E-Government Development Index</i> (EGDI) Negara-Negara ASEAN Tahun 2018.	4
3.	Model Berpikir Penelitian.	35
4.	Struktur Organisasi BPS.	43
5.	Tampilan Microsoft Dynamic AX 2012 R2.	47
6.	<i>Dashboard</i> Sistem Informasi <i>BackOffice</i> .	50
7.	Tampilan Sistem Informasi <i>BackOffice</i> pada <i>Subject Matter</i>	51
8.	Alur Proses Permintaan Belanja (Tahap 1).	52
9.	Alur Permintaan Belanja (Tahap 2)	53
10.	Contoh Gangguan Teknis Sistem Informasi <i>BackOffice</i> .	73

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Lampiran
1.	Surat Pengantar Penelitian.
2.	Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian.
3.	Pedoman Wawancara Penelitian.
4.	Pedoman Telaah Dokumen Penelitian.
5.	Daftar Riwayat Hidup Studiwan.

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Transisi reformasi yang terjadi di Indonesia telah mendorong perubahan secara fundamental paradigma publik di bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya, serta mendorong lahirnya reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara. Reformasi pengelolaan keuangan negara mengharuskan pemerintah untuk melaksanakan efisiensi, efektifitas, transparansi, tata kelola yang baik, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Reformasi pengelolaan keuangan negara lahir dengan diterbitkannya paket perundang-undangan di bidang keuangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara..

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat, pemerintah berupaya mengintegrasikan reformasi pengelolaan keuangan negara menyesuaikan dengan kemajuan TIK tersebut. Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (*e-government*) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas,

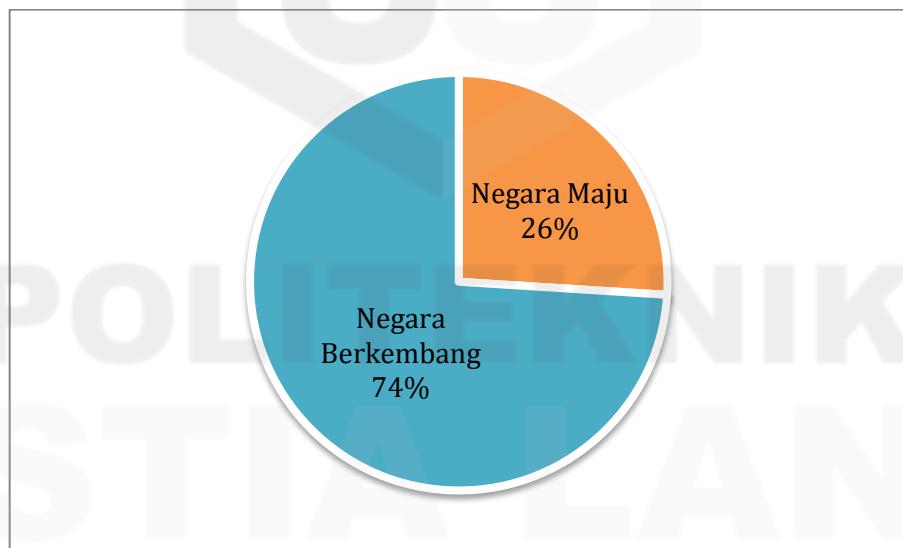
transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga penyelenggaran pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud.

Upaya pemerintah dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), salah satunya dengan melakukan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan ditetapkannya Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025. *Grand design* reformasi birokrasi 2010–2025 ini menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi di instansi masing-masing. Pelaksanaan operasional *grand design* reformasi birokrasi 2010–2025 ini dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap lima tahun sekali oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Salah satu dari delapan program reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah adalah program penataan tatalaksana. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistem manajemen pemerintahan. Target yang ingin dicapai dari program ini adalah meningkatnya pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintah. Hal ini menunjukan bahwa Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya telah memasuki era *digital divide*, yakni memanfaatkan TIK dan internet dalam rangka kepentingan pembangunan.

Berdasarkan laporan *International Telecommunication Union* (ITU) tahun 2018 menunjukan bahwa pada tahun 2017 diperkirakan hampir setengah dari penduduk dunia (49% dari total penduduk dunia) telah menggunakan internet. Hampir 74% total pengguna internet dunia berada di negara berkembang, seperti pada gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1 Persentase Pengguna Internet di Negara Maju dan Negara Berkembang

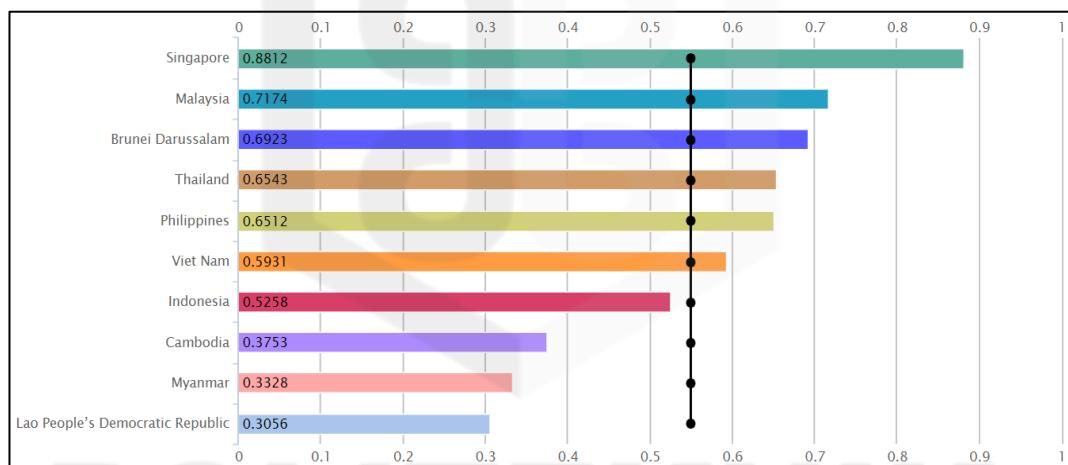


Sumber: *International Telecommunication Union*, 2018.

Berdasarkan hasil Survei *United Nations E-Government 2018, E-Government Development Index* (EGDI) Indonesia tahun 2018 menempati peringkat 107 dari 192 negara dengan nilai 0,5258 dari nilai maksimal 1, sedikit berada di bawah nilai rata-rata EGDI dunia 0,5491, dan meningkat sembilan peringkat dari tahun 2016 (PBB, 2018:225). Sementara, EGDI

Indonesia tahun 2018 diantara negara-negara ASEAN berada di peringkat tujuh dari 10 negara ASEAN (lihat gambar 1.2).

Gambar 1.2 Peringkat *E-Government Development Index* (EGDI) Negara-Negara ASEAN Tahun 2018



Sumber: *United Nations*, 2018.

Beberapa negara berkembang telah mengimplementasikan *e-Government* untuk peningkatan pelayanan publik sesuai karakteristik negara masing-masing (El-Gohary, 2017:7510), seperti di Malaysia. Sejak tahun 2000 Pemerintah Malaysia telah memulai *e-government* dengan membangun aplikasi sistem layanan pemerintahan berbasis TIK yang modern kepada warganya. Aplikasi sistem layanan pemerintahan tersebut dikenal dengan aplikasi MyEG (Kamarudin et al., 2018:27)

Menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 di atas, Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah telah melakukan

implementasi *e-government* dengan karakteristik masing-masing instansi. Pada tingkat pemerintah pusat, kita dapat melihat contoh implementasi *e-government* salah satunya di Kementerian Keuangan (Akhmadi, 2017:52). Pengembangan *e-government* yang diimplementasikan oleh Kementerian Keuangan didukung dengan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terpadu atau *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS), seperti: *e-Filing* (SPT), *e-Procurement*, SPAN, SAKTI, Modul Penerimaan Negara (MPN), Portal Pengguna Jasa DJBC, Aplikasi Cukai Online, Aplikasi Manifest, SAIBA, SIMAK BMN, SIMANTAP, Aplikasi RKA-KL, Aplikasi Standar Biaya, KOMANDAN SIKD, *Web Based Reporting System* DAK, *Online Recruitment*, dan *e-Registration* (NPWP). Secara khusus, sistem informasi pengelolaan anggaran (*e-Budgeting*), diantaranya: SPAN, SAKTI, Modul Penerimaan Negara (MPN), Aplikasi RKA-KL, KOMANDAN SIKD, *Web Based Reporting System* DAK, dan lain-lain.

Pada tingkat pemerintah daerah, dapat dilihat contoh implementasi *e-government* di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan implementasi *e-governmnet* di bidang pengelolaan anggaran yang dikenal dengan *e-budgeting*. Implementasi program *e-budgeting* ini dilakukan dalam rangka mempercepat proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Rahman et al., 2018:54)

Pada instansi pemerintah lainnya, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki Sistem Informasi Tagihan (SINTAG), sebuah sistem aplikasi komputer yang dikembangkan oleh Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan BPK yang berfungsi sebagai alat bantu untuk membuat operasional pekerjaan rutin menjadi lebih efektif (Siregar, 2017:8). Contoh lain dari implementasi aplikasi pengelolaan anggaran di Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu Krisna-Bappenas, sebuah aplikasi penyusunan rencana kerja anggaran dan kegiatan yang dikelola Kementerian PPN/Bappenas. Aplikasi Krisna-Bappenas dan RKA-KL menghasilkan produk utama, yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA K/L merupakan daftar pelaksanaan keuangan tahunan K/L yang disusun berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) satu tahun anggaran. Untuk pelaksanaan anggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan keuangan K/L mengacu kepada perundang-undangan lain sampai petunjuk teknis yang diterbitkan oleh K/L tersebut merujuk kepada payung hukum perundang-undangan penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi APBN K/L mudah dilakukan. Pada sisi yang lain DIPA dan Laporan Keuangan K/L dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan K/L baik dari sisi pendapatan, sisi belanja, dan transparansi kinerja anggaran.

Dalam rangka melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 di Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya pada program penataan tata

laksana yang berfokus pada kegiatan: evaluasi bisnis proses dan *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM) Satuan Kerja, peningkatan pelayanan dengan *e-Government*, dan penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik, sejak 2018 BPS Pusat telah mengimplementasikan sistem informasi pengelolaan anggaran yang dinamakan Sistem Informasi *BackOffice*. Sistem Informasi *BackOffice* merupakan sistem informasi terintegrasi mulai dari perencanaan, pengelolaan, penggunaan, serta monitoring anggaran.

Pengembangan Sistem Informasi *BackOffice* ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, memudahkan sistem pelaporan keuangan, otomatisasi proses penggunaan anggaran, pengelolaan dokumentasi yang terstruktur, monitoring penggunaan anggaran secara *realtime*, sebagai bahan analisis untuk menentukan perencanaan anggaran berikutnya yang lebih efektif dan efisien, serta sebagai sarana mempertahankan status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan BPS. Perkembangan perolehan opini BPK atas Laporan Keuangan BPS lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini. Pada tahun 2015 perolehan opini BPK atas Laporan Keuangan BPS tahun 2015 turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Status opini WDP tersebut mendorong BPS untuk terus berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan. Hal ini pula yang menjadi salah satu alasan

BPS meluncurkan aplikasi Sistem Informasi *BackOffice* sebagai sistem informasi pengelolaan anggaran di BPS.

Tabel 1.1 Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS Tahun 2014–2018

2014	2015	2016	2017	2018
WTP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan, 2019.

Sebelum diimplementasikannya Sistem Informasi *BackOffice*, pengelolaan anggaran masih dilakukan secara manual. Beberapa kondisi yang terjadi sebelum diimplementasikannya Sistem Informasi *BackOffice*, antara lain: (1) data keuangan dan data penganggaran tidak terintegrasi, sehingga menyebabkan adanya *gap* pagu antara data revisi dengan data keuangan yang menyebabkan pagu minus dan *subject matter* membutuhkan waktu yang agak lama untuk mendapatkan pagu sisa anggaran; (2) penggunaan dokumen dan format data yang tidak standar sehingga mengakibatkan kesalahan pembebanan anggaran; (3) pengelolaan dokumen belum dalam suatu sistem masih dilakukan secara manual; (4) tidak adanya kontrol data realisasi untuk belanja yang masih dalam proses; dan (5) monitoring keuangan dan anggaran tidak dapat diketahui secara cepat.

Setelah diimplementasikannya Sistem Informasi *BackOffice* memang proses pengelolaan anggaran di BPS mengalami perubahan. Perubahan kondisi yang terjadi setelah diimplementasikannya Sistem Informasi *BackOffice*, antara lain: (1) proses pengelolaan anggaran lebih otomatis

dalam sistem; (2) berkurangnya masalah pagu minus, karena *subject matter* tidak dapat menggunakan anggaran melebihi anggaran yang sudah ditetapkan; (3) pengelolaan anggaran menjadi lebih disiplin dan sesuai aturan, misalnya pegawai tidak dapat melakukan lebih dari satu kegiatan di waktu yang bersamaan; dan (4) pimpinan atau *subject matter* dapat memantau dan mengetahui kondisi anggaran di masing-masing unit kerja secara berkala.

Implementasi Sistem Informasi *BackOffice* sudah berjalan lebih dari setahun di BPS Pusat. Namun, masih ditemukan beberapa permasalahan dari implementasi Sistem Informasi *BackOffice* ini. Beberapa permasalahan yang ditemukan, antara lain: (1) Sistem Informasi *BackOffice* hanya diimplementasikan di BPS Pusat. Padahal BPS merupakan instansi vertikal yang memiliki kantor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (2) ada jeda waktu bagi *subject matter* untuk mengetahui realisasi anggaran yang sudah digunakan; (3) proses perencanaan dan pengelolaan anggaran dilakukan di sistem informasi yang berbeda; dan (4) bendahara masih harus menginput pembebanan anggaran pada sistem informasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Siregar (2017), dengan fokus penelitian efektivitas penggunaan Sistem Pengendalian Tagihan (SINTAG) pada Biro Keuangan Badan BPK ditinjau dari aspek akurasi, ketepatan waktu, relevansi, dan kelengkapan informasi. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan SINTAG di Biro Keuangan BPK dianggap cukup efektif, karena memenuhi syarat keempat aspek tersebut. Penelitian lain yang dilakukan oleh Makmun (2010) dengan fokus penelitian evaluasi terhadap penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Evaluasi dilakukan terhadap tiga sistem informasi yang terdapat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah, yaitu Sistem Informasi Anggaran, Sistem Informasi Pertanggungjawaban, dan Sistem Informasi Pelaporan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Penganggaran, Sistem Informasi Pertanggungjawaban, dan Sistem Informasi Pelaporan cukup relevan dan efektif sebagai Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Pangestika dan Sari (2016) dengan fokus penelitian bagaimana efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal ditinjau dari aspek relevansi, keandalan, dan keterbandingan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan SIMDA relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Penerapan SIMDA berdasarkan hasil dengan pendekatan fenomenologi adalah efektif.

Penelitian terdahulu di atas, seluruhnya berfokus pada bagaimana efektivitas dari implementasi sistem informasi. Sementara penelitian ini akan fokus pada penjelasan faktor-faktor penyebab implementasi sistem informasi

pengelolaan anggaran di BPS masih kurang efektif. Penelitian ini juga menggunakan beberapa aspek yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang menjadi indikator dari efektivitas implementasi sistem informasi pengelolaan anggaran.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka fokus permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah mengapa implementasi sistem informasi pengelolaan anggaran di Badan Pusat Statistik masih kurang efektif.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan implementasi sistem informasi pengelolaan anggaran di Badan Pusat Statistik masih kurang efektif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Terhadap Kepentingan Dunia Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang sistem informasi, khususnya yang terkait dengan dengan

implementasi sistem informasi dalam pengelolaan keuangan atau anggaran di suatu instansi pemerintah.

2. Manfaat Terhadap Dunia Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pimpinan sebagai solusi alternatif yang terkait dengan pengembangan implementasi sistem informasi pengelolaan anggaran di Badan Pusat Statistik.

POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa penyebab implementasi Sistem Informasi *BackOffice* sebagai sistem informasi pengelolaan anggaran di BPS masih kurang efektif. Pertama, Sistem Informasi *BackOffice* belum terhubung secara langsung dengan sistem informasi keuangan dari Kementerian Keuangan, sehingga input data pembebanan anggaran dari Sistem Informasi *BackOffice* ke sistem informasi keuangan tersebut masih dilakukan secara manual. Kedua, Sistem Informasi *BackOffice* belum terhubung secara langsung dengan sistem informasi KPPN yang menerbitkan SPM dan SP2D, sehingga ada jeda waktu Sistem Informasi *BackOffice* dalam menyajikan informasi realisasi anggaran bila operator terlambat melakukan input data. Ketiga, adanya perbedaan struktur *database* antara Sistem Informasi *BackOffice* dengan sistem informasi keuangan dari Kementerian Keuangan, sehingga Sistem Informasi *BackOffice* belum terintegrasi dengan sistem informasi keuangan tersebut. Keempat, kurangnya pelaksanaan pelatihan penggunaan Sistem Informasi *BackOffice* bagi para pengguna atau operator.

Implementasi Sistem Informasi *BackOffice* juga dianggap masih kurang efektif disebabkan karena masih kurang andalnya Sistem Informasi *BackOffice*, sistem masih sering mengalami kesalahan dan gangguan teknis (*error*). Masih kurang cakap dan disiplinnya pengguna atau operator Sistem Informasi *BackOffice* dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, disampaikan beberapa saran bagi pihak BPS sebagai berikut. Perlu dilakukan koordinasi antara BPS dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan integrasi dan *bridging* struktur *database* Sistem Informasi *BackOffice* dengan sistem informasi keuangan dari Kementerian Keuangan. Kemudian koneksi Sistem Informasi *BackOffice* dengan sistem informasi penerbitan SPM dan SP2D di KPPN, sehingga meminimalisir input manual realisasi anggaran oleh operator. Sistem Informasi *BackOffice* juga perlu dilengkapi dengan menu kontrol dan *reminder* progres penyelesaian pekerjaan operator di masing-masing bagian yang dapat dipantau oleh atasan atau supervisor. Perlu dialokasikan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan pelatihan penggunaan Sistem Informasi *BackOffice* dan pengembangannya.

Selain itu perlu dilakukan perbaikan dan pengembangan Sistem Informasi *BackOffice*, serta menentukan *software* yang *user friendly* dan memiliki kinerja yang baik, sehingga kesalahan dan gangguan teknis dapat

diminimalisir. Perlu dibuat peraturan sebagai landasan hukum implementasi Sistem Informasi *BackOffice* dan petunjuk teknis bagi penggunanya. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi aspek legalitas dari Sistem Informasi *BackOffice* sebagai sistem informasi pengelolaan anggaran di BPS dan aspek yang mengikat pengguna atau operator Sistem Informasi *BackOffice* untuk disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Serta perlu dibentuk tim khusus dengan jumlah SDM yang memadai yang berasal dari perwakilan bagian IT, anggaran, perbendaharaan, inspektorat, dan *subject matter*, untuk ditugaskan melakukan pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi *BackOffice*.

Bagi pihak yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sejenis, disarankan untuk mengkaji efektivitas implementasi sistem informasi menggunakan indikator yang lebih luas lagi. Perlu ditentukan indikator yang relevan dengan kondisi lokus dan objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, M. H. 2017. "Evaluasi Dukungan Organisasi Terhadap Implementasi E-Government : Studi Kasus Sistem Aplikasi Keuangan Negara". *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(2), 51.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2015–2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2017. Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik 2016. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik 2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bastian, Indra. 2006a. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Erlangga.
- _____. 2006b. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Blocher, et. al. 2011. *Manajemen Biaya: Penekanan Strategis* (Edisi 5 Buku 1). Jakarat: Salemba Empat.
- Darmawan, Deni dan Fauzi, Kunkun Nur. 2013. Sistem Informasi Manajemen. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Deliusno. 2011. Microsoft Dynamics AX 2012 Sudah Tersedia di Indonesia. Diakses pada tanggal 23 April 2020.
<http://www.jagatreview.com/2011/12/microsoft-dynamics-ax-2012-sudah-tersedia-di-indonesia/>

- El-Gohary, E. M. 2017. "E-government Implementation in Developing Countries: A Literature Review". *International Journal of Computers & Technology*, 16(1), 7510–7524.
- Gunawan, Dimas Rizky. 2016. "Penerapan Sistem *E-Budgeting* Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya)". *AKRUAL Jurnal Akuntansi* 8(1), 2016.
- Halim, Abdul. (Ed). 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah* (Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Irmawarti et al. 2018. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada PT. PLN (Persero) Kota Banda Aceh". *Jurnal Kolegial*, 6(2), 169-178.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
- International Telecommunication Union. 2018. *Measuring the Information Society Report (Volume 1)*. Swiss: Telecommunication Development Bureau.
- Kamarudin, S., Omar, S. Z., Bolong, J., & Osman, M. N. 2018. "E-Government Services Implementation: Is it a Need?". *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(11), 22–29.
- Makmun. 2010. *Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi DKI Jakarta*. Tesis Tidak Diterbitkan. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.
- Marakas, George M. dan O'Briend, James A. 2017. *Pengantar Sistem Informasi* (Edisi 6 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- McLoeod, Raymond dan Schell, George P. 2011. *Sistem Informasi Manajemen* (Edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.
- Munandar, M. 2012. *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja* (Edisi Kedua). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Pangestika, Aulia Lorie dan Sari, Yeni Priatna. 2016. "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal".

Prosiding Seminar Nasional IPTEK Terapan (SENIT) 2016, ISBN: 978-602-74355-0-6.

- Pangestika, Witdya. 2018. Mengenal Sistem Informasi Manajemen dan Manfaatnya Bagi Perusahaan. Diakses pada tanggal 26 November 2019. <https://www.jurnal.id/id/blog/2018-mengenal-sistem-informasi-manajemen-dan-manfaatnya-bagi-perusahaan/>
- Pekei, Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Taushia.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010–2014.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015–2019.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.
- Rahman et al. 2018. “Analisis Implementasi *E-Budgeting* dengan Menggunakan Model CIPP pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”. *Jurnal Sistem Informasi* 14(2), 2018.
- Ramadhani, Niko. Apa Itu *E-Budgeting*? Apa Kelebihannya?. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2020. <https://www.akseleran.co.id/blog/e-budgeting/>
- Shim, Jae K. dan Siegel, Joel G. 2001. *Budgeting: Pedoman Lengkap Langkah-Langkah Penganggaran*. Jakarta: Erlangga.
- Sholihah, Mar'atus. 2018. “Analisis Keandalan Sistem pada Layanan *Drive Through* dan *Counter Service*”. *Jurnal Bisnis & Manajemen*, 18(2), 23-38.
- Siagian, Sondang P. 2016. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar, Ferdy Riandy Halomon. 2017. *Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG) pada Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*. Tesis Tidak Diterbitkan. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.
- Supriyati. 2015. “Pengaruh Kompetensi *User*, Keandalan *Software* dan Keandalan *Database* Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi (Survey

Pada Perusahaan BUMN yang Menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Berpusat di Kota Bandung)". *Jurnal Majalah Ilmiah Unikom*, 13(1), 13-24.

United Nations. 2018. *United Nations E-Government Survey 2018: Gearing E-Government to Support Transformation towards Sustainable and Resilient Societies*. New York: Department of Economic and Social Affairs.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Zaidi, Syed Faizan Hussain. 2017. *E-Government Services Effectiveness Evaluation Framework (E-GEEF) A Case Study of Indian E-tax Service*. Disertasi Tidak Diterbitkan. London: School of Computing and Digital Media, London Metropolitan University.